

BUDAYA MARITIM NUSANTARA SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN IDENTITAS NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Toni^{1*}, Ufi Saraswati²

¹ SMKN IV SPP-SPMA Singkawang, Jl. Sagatani No.KM 7, RW.8, Sijangkung, Kota Singkawang, Indonesia

² Dosen, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia

Email Koresponden: tonibaktimanggala@students.unnes.ac.id^{1*}

Email Penulis: ufirati@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This research examines the important role of Indonesia's maritime culture from the era of kingdoms to the present context as a bastion of national identity defense in the era of globalization. The maritime glory of the past Nusantara can serve as a model in the development of national identity in the era of globalization, which presents challenges through changing societal preferences in addressing the decline of interest in maritime culture. The aim of this research is to broaden the understanding of the past Maritime Culture of the Archipelago and its application in the present as a form of national identity defense. Using a descriptive qualitative research method, data were obtained through literature studies such as reviews of relevant previous journal articles. The research results show that maintaining national identity amid the era of globalization should be carried out by the Indonesian people, so that our identity as a nation and country does not fade or even disappear due to the rapid currents of globalization, one of which is through awareness of maritime culture. Since the era of the Nusantara kingdoms, it has been an important center of navigation and trade. Maritime kingdoms such as Sriwijaya, Majapahit, and Demak played a dominant role in international trade and control of maritime territories. After independence, the Indonesian government sought to rebuild maritime glory through various policies, both by the government and in the realms of formal and non-formal education, including the Djuanda Declaration

Keywords: *maritime culture, national identity, globalization*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran penting budaya maritim Indonesia dari masa kerajaan sampai konteks masa kini sebagai benteng pertahanan identitas nasional di era globalisasi. Kejayaan maritim Nusantara masa lampau bisa menjadi gambaran dalam pengembangan Identitas nasional di era globalisasi yang memberikan tantangan melalui perubahan preferensi masyarakat dalam mengatasi penurunan minat terhadap budaya maritim. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuka wawasan tentang Budaya Maritim Nusantara masa lampau dan penerapannya di masa kini sebagai bentuk pertahanan identitas nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi literatur seperti kajian artikel jurnal terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merawat identitas nasional di tengah era globalisasi sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, supaya jati diri kita sebagai bangsa dan negara Indonesia tidak memudar bahkan hilang oleh arus globalisasi yang sangat pesat, salah satunya dengan adanya wawasan mengenai budaya maritim. Sejak masa kerajaan Nusantara telah menjadi pusat pelayaran dan perdagangan yang penting. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit dan Demak memainkan peran dominan dalam perdagangan internasional dan penguasaan wilayah perairan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membangun kembali kejayaan maritim melalui berbagai kebijakan baik oleh pemerintahan, dalam dunia pendidikan formal dan non formal, termasuk dengan adanya Deklarasi Djuanda.

Kata Kunci: Budaya Maritim, Identitas nasional, globalisasi

Cara sitasi: Toni., & Saraswati, U. (2025). Budaya maritim nusantara sebagai benteng pertahanan identitas nasional di era globalisasi. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 6 (2), 414-424.

PENDAHULUAN

Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mendominasi di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama dalam kekuatan maritim yang sangat besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek Maritim hal ini dilatarbelakangi oleh bentang alamiah wilayah Indonesia itu sendiri sejak dahulu bahkan sebelum konsep negara Indonesia saat ini ada. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia sebagai negara Maritim terbesar di dunia. Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, para pelaut Nusantara mampu mengarungi samudra luas hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan. Sayangnya, kejayaan laut Indonesia mulai memudar seiring berjalanya waktu setelah mencapai kejayaan budaya baharisetelah VOC dan Belanda masuk ke Indonesia, lambat laun budaya maritim mulai hilang dan digantikan dengan budaya agraris. Indonesia yang dulunya pernah jaya dengan pelaut pelaut yang handal di zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya perlu ditanamkan kembali kepada generasi muda. Jayanya maritim Indonesia pada masa lalu perlu menjadi penyemangat dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang. Banyak masyarakat yang masih membelakangi laut daripada menghadap laut yang berarti banyak yang bermata pencaharian di sektor wilayah darat daripada laut (Wiranto, 2020)

Fungsi laut sebagai pemersatu telah menghasilkan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, *Archipelagic State* (Negara Kepulauan). Perikat dari adanya persatuan itu yaitu budaya maritim yang diimplementasikan menjadi aktivitas pelayaran dan perdagangan yang saling menghubungkan serta saling kenal mengenal. Dengan adanya koneksi antar pulau dan budaya maritim itu, maka integrasi nasional semakin kuat dan sejalan dengan keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia yang di cita-citakan (Salim & Nugroho, 2021). Tetapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa budaya maritim saat ini masih terbelakang dan masih didominasi sektor darat dalam segi ekonomi, sosial, budaya. Akan lebih baik apabila ada kesetaraan antara budaya maritim dan darat. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, Hakikat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata "tanah air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain (Wa Ode Reni1, 2024)

Kejayaan maritim Nusantara bisa dilacak kembali pada periode abad ke VII – XV Masehi, dimana wilayah Nusantara dikuasai oleh banyak kerajaan besar dan berpengerauh, seperti Kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit, hingga Demak. Kerajaan-kerajaan tersebut memainkan peran penting dalam lalu lintas internasional dan memiliki pengaruh besar bukan hanya dari segi ekonomi saja akan tetapi dari berbagai bidang seperti politik, Sosial, Budaya, dan lain sebagainya.

Dalam era moderen saat ini wawasan budaya maritim sangat penting pertahanan Identitas Nasional di era Globalisasi. Mengingat identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi yang merujuk pada ciri-ciri, nilai, simbol, budaya, dan elemen-elemen lain yang menjadi karakteristik suatu bangsa atau negara, yang membedakannya dengan bangsa atau negara lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika identitas nasional adalah globalisasi, globalisasi dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya serta koneksi tanpa hambatan yang memungkinkan masuknya budaya luar dan ditakutkan terkikisnya budaya lokal atau bahkan matinya budaya lokal (Aulia et al., 2021).

Melalui pengkajian dan wawasan warisan budaya maritim, penelitian ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana identitas nasional dapat dibentuk dan diperkuat melalui upaya pelestarian warisan budaya maritim. Wawasan ini dikaji sebagai bagian dari upaya pertahanan Identitas nasional di era globalisasi yang memberikan tantangan melalui perubahan preferensi masyarakat dan penurunan minat terhadap budaya maritim. Selain itu, pengelolaan

maritim Indonesia belum memaksimalkan potensi yang dimilikinya dan lebih difokuskan pada pembangunan darat sehingga dalam hal ini bahkan Indonesia masih kalah oleh Singapura dalam pengelolaan sektor laut. Dengan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu membuka wawasan tentang Budaya Maritim Nusantara masa lampau dan penerapannya di masa kini sebagai bentuk pertahanan identitas nasional

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi literatur seperti kajian terdahulu yang relevan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang secara holistik mengkaji dan memahami fenomena yang dialami subyek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan, yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, pada satu konteks khusus yang dialami dan dirasakan (Moleong, 2018).

Menurut Nazir (2014) menyatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipercahkan. Dari hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan tidak menggunakan angka (numeric). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan kajian terhadap dokumen, buku, jurnal ilmiah dan sejenisnya untuk memperoleh keterangan yang nyata dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun untuk memastikan validitas data maka dilakukan beberapa teknik analisis diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/kesimpulan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa sumber artikel dan buku sebagai rujukan Artikel Aulia, L. R., dkk (2021) dengan judul "*mengenal identitas nasional indonesia sebagai jati diri bangsa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi*". Hardianto (2021) "*evolusi doktrin pertahanan Indonesia sebagai negara Maritim*". Zuhdi, S. (2020) dengan judul "*Budaya Bahari sebagai modal membangun negara maritim Indonesia*". Salin & Nugroho (2021) "*Budaya maritim Suku Biak dalam tinjauan Integrasi Nasional*". Dalam pengambilan sumber ini berkaitan dengan tema penelitian dan mampu menunjang kebutuhan informasi yang komprehensif dalam menjawab permasalahan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Nasional dan Tantangannya nya di Era Globalisasi

Secara umum, pengertian identitas yaitu jati diri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, organisasi, kelompok atau suatu negara yang menjadi pembeda dengan negara lain. Identitas ini bisa berupa identitas fisik maupun identitas non fisik. Identitas bisa dinyatakan secara sadar dengan menjelaskan tentang dirinya atau diungkapkan oleh seseorang atau kelompok lainnya. Artinya identitas nasional adalah ciri yang melekat pada individu, atau kelompok yang lebih besar dan diikat oleh berbagai kesamaan fisik seperti budaya, adat istiadat, agama, kebiasaan dan bahasa daerah atau berupa kesamaan non fisik seperti keinginan, harapan, cita-cita dan tujuan (Hilmi, 2022).

Identitas nasional merupakan sebuah ciri-ciri ataupun penanda yang melekat pada suatu bangsa sehingga dapat menjadi pembeda. Sama halnya dengan bangsa-bangsa di dunia, bangsa Indonesia juga mempunyai identitas nasional yang melekat sebagai jati diri bangsa, tentunya identitas tersebut harus dijaga dan dipertahankan demi keutuhan bangsa. Identitas nasional tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya serta adat istiadat suatu masyarakat. Identitas nasional merupakan sebuah ciri-ciri ataupun penanda yang menandai suatu bangsa sehingga memiliki pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional berisi nilai-nilai budaya yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan, norma sosial serta adat istiadat yang ada di masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini membawa banyak perubahan dan perkembangan yang signifikan pada sebagian besar

aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tentunya ada yang membawa dampak baik dan buruk bagi eksistensi identitas nasional suatu bangsa. Generasi muda sebagai penerus keberlangsungan dan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dengan mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing. Jika tidak segera diambil langkah antisipasi, tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme dan identitas nasional tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat mempertahankan identitas nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan penyesuaian perkembangan arus ilmu pengetahuan dan teknologi yang di adopsi oleh masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal.

Globalisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang kemudian menyebar secara luas dari suatu sisi dunia ke sisi dunia lain tanpa adanya hambatan ruang dan waktu sehingga tidak adanya lagi batas-batas yang jelas di suatu negara. Akan tetapi, terkait definisi globalisasi itu sendiri belum ditemukan penjelasan yang benar dan tepat. Sebab hal itu tergantung pandangan orang dalam menilai dari sisi mana makna globalisasi tersebut. Di era globalisasi masyarakat di setiap negara dapat dengan mudahnya mencari dan mengetahui informasi dan fenomena yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Selain sisi positif terdapat pula sisi negatif dalam kehadiran globalisasi dampak negatif globalisasi bagi suatu bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak tersebut berupa tantangan terhadap identitas nasional, seperti kemunculan hedonisme, lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme, memudarnya sikap gotong royong, dan lunturnya sikap sopan santun yang terpengaruh oleh nilai-nilai liberal dan sekuler dari negara-negara barat. Tantangan tersebut perlu diatasi oleh masyarakat Indonesia, jika tidak maka keamanan bangsa dan negara serta kesatuan dan persatuan akan terancam terutama dalam identitas nasional generasi muda.

Dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi terhadap identitas nasional masyarakat dapat melakukan berbagai upaya seperti menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, menanamkan sikap rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, dan memanfaatkan situs jejaring sosial dengan baik. Langkah yang bisa di ambil dalam membentengi identitas nasional bangsa tidak harus dimulai dengan hal besar tapi dapat dimulai dari hal yang kecil, merawat identitas nasional di tengah era globalisasi sudah seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan agar jati diri kita sebagai bangsa dan negara Indonesia tidak memudar bahkan hilang oleh arus globalisasi yang sangat pesat ini (Aulia et al., 2021).

Budaya Maritim

Dalam (Wa Ode Reni¹, 2024) disebutkan bahwa sejarah maritim Indonesia menunjukkan peran vitalnya dalam perkembangan budaya, ekonomi, dan politik bangsa dari masa ke masa, yaitu:

1. Prasejarah: Nenek moyang bangsa Indonesia mulai berlayar dan bermigrasi ke Nusantara sejak 12.000 tahun lalu, mengembangkan perahu bercadik dan nekara perunggu yang menunjukkan awal mula budaya maritim dan perdagangan antar pulau.
2. Kerajaan Maritim: Sriwijaya (VII-XIII): Menguasai perdagangan internasional melalui Selat Malaka, mencapai puncak kejayaan pada abad ke-10, namun mengalami kemunduran pada abad ke-13. Kerajaan Majapahit (XIII-XV): Menjadi kekuatan maritim besar di Nusantara melebihi kerajaan Sriwijaya, mengendalikan jaringan perdagangan yang luas, tetapi mulai menurun pada awal abad ke-15 karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Demak (XV-XVI): Tumbuh sebagai kerajaan maritim Islam yang kuat setelah jatuhnya Malaka, namun mengalami kemunduran akibat konflik internal setelah kematian Sultan Trenggana.
3. Pasca Kemerdekaan: Orde Lama (1945-1965): Soekarno mendeklarasikan "Wawasan Nusantara" yang menegaskan kesatuan wilayah Indonesia. Orde Baru (1966-1998): Soeharto meratifikasi UNCLOS 82, mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Reformasi (1998-sekarang): Pemerintah mengembangkan sektor maritim dengan visi

Indonesia sebagai poros maritim dunia, memaksimalkan potensi laut untuk kesejahteraan bangsa.

Jauh sebelum sekarang ini, ternyata Indonesia sudah sangat familiar dengan budaya maritim. Bahkan ada sepenggal lirik syair lagu anak-anak yang menggambarkan jiwa pantang menyerah yang lahir dari keinginan dasar sebagai Negara kepulauan (Indonesia), *Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa....* menggambarkan sebuah bangsa dimana wilayahnya dikelilingi oleh laut, lautan itu pula menjadi pemersatu dan pengikat antar pulau satu dengan pulau lainnya. Wilayah Indonesia 2/3 nya merupakan wilayah lautan (dua per tiga). Artinya berdasar topografi, wilayah Indonesia memiliki sumber daya maritim yang lebih besar dibandingkan sumber daya darat.

Konsep “Total History” yang disampaikan oleh Fernand Braudel, mengenai tiga jenis fakta sejarah, yaitu *event* (peristiwa), *conjuncture* (saling memiliki hubungan), dan *structure* (rangkainan atau urutan), berkaitan dengan kajian perkembangan maritim nusantara, hal ini memberikan bukti kuat terhadap fakta sejarah dari tiga kerajaan besar maritim yang pernah berdiri dan menjadi subjek penulisan artikel ini, diantaranya Kerajaan Sriwijaya (sekitar 670-1025), Kerajaan Majapahit (sekitar 1293-1498), dan Kesultanan Demak (sekitar 1475-1554). Dalam perkembangannya, conoth ketiga kerajaan maritim tersebut telah mengalami tiga fase, yakni awal pendirian dan masa merintis kerajaan, masa kejayaan yang gilang gemilang, dan masa kemunduran hingga keruntuhan.

Aspek lainnya menjadi interkoneksi atau hubungan dari ketiga kerajaan di atas, yaitu berkaitan dengan peristiwa sosial, politik, dan ekonomi, antara lain Sriwijaya sebagai kerajaan maritim pertama yang memulai aktivitas pelayaran di nusantara sejak berdiri sekitar abad ke-7 dan tercatat sebagai negara maritim yang sangat besar, lalu secara konsisten menjalin hubungan kerja sama dagang dengan beberapa negara sekitar untuk mendapat keuntungan, yaitu Arab, Cina, Persia, dan India. Semangat itu kemudian diwariskan ke masa kerajaan-kerajaan maritim setelahnya, yakni Kerajaan Majapahit yang berkembang sekitar abad ke-13, dengan pencapaian besar berhasil mengendalikan lalu lintas perdagangan di seluruh nusantara, dan menyebarkan pengaruh kekuasaannya sampai ke Semenanjung Melayu, Malaka (Singapura), Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, dan India. Setelah itu, pengaruh maritim tergantikan oleh kehadiran Kesultanan Demak, yang didirikan oleh seorang putra yang masih memiliki hbugnan kekerabatan dengan kerajaan Majapahit yaitu keturunan Raja Majapahit terakhir (Prabu Brawijaya V), bernama Raden Patah sekitar abad ke-15, dan sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Demak tidak hanya berfokus dalam penyebaran agama islam di pulau Jawa saja, melainkan melainkan turut dalam pemajuan sektor ekonomi melalui perdagangan bebas di sekitar laut Jawa, yang menjadinya kerajaan islam terbesar di Pulau Jawa hingga sekitar abad ke 16 M (Mahamid, 2023).

Sriwijaya : Kerajaan Maritim Terbesar Pertama di Nusantara

Telah dikemukakan bahwa terdapat dua kerajaan maritim besar pada zaman dahulu yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Rentang kehidupan Sriwijaya kurang lebih 5 abad, Majapahit kira-kira 3 abad; sedangkan NKRI ‘baru’ 79 tahun. Pada awal abad ke-10, perkembangan Kerajaan Sriwijaya sangat pesat dan telah mencapai puncak kejayaannya, Sriwijaya menjalin hubungan perdagangan dengan banyak bangsa seperti Arab, India, dan Cina, salah satu hubungan dagang yang erat yaitu dengan Kerajaan Chola di India Selatan. Hubungan tersebut tidak hanya bertujuan politik dan ekonomi, melainkan suatu upaya penyebaran agama Islam oleh pedagang Arab, dan agama Budha oleh pedagang India. Produk lokal Kerajaan Sriwijaya yang banyak di minati pasar internasional dan menjadi target ekspor penjualan, antara lain komoditas beras, rempah-rempah, gading, kayu manis, kemenyan, emas, kulit binatang, dan lain-lain. Dalam mencapai target pasar yang lebih besar, Sriwijaya kemudian memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaannya hingga mencapai perairan Laut Jawa, Laut Banda, dan laut timur Indonesia (Mahamid, 2023).

Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai, negara perniagaan dan negara yang berkuasa di laut. Kekuatan serta kekayaan kerajaan ini dihasilkan dari perdagangan internasional yang ramai disekitar Selat Malaka, selat ini menghubungkan perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat hingga ke Eropa. Jalan tersebut selama lima belas abad mempunyai arti yang penting dalam sejarah. Sriwijaya adalah pusat perdagangan penting yang pertama pada jalur perdagangan ini, kemudian diganti oleh tempat-tempat atau kota-kota lain. Perdagangan di Nusantara yaitu di kerajaan-kerajaan tradisional disebutkan Van Leur mempunyai sifat kapitalis. Lebih jelas disebut sebagai kapitalisme politik di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Dalam perkembangannya model kapitalisme semacam itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu kapitalisme modern dan kapitalisme perdagangan.

Van Leur melukiskan bahwa ketika itu di Asia terdapat dua jalan perniagaan besar, yaitu jalur yang melalui darat dan melalui laut. Jalan darat disebut sebagai "jalan sutera" yang menghubungkan Tiongkok melalui Asia Tengah dari Turkestan sampai ke laut Tengah (laut mediterania), dimana jalan ini berhubungan dengan jalan-jalan yang digunakan kafilah dagang dari India. Perhubungan darat antara Tiongkok, India dengan Eropa sudah digunakan semenjak tahun 500 sebelum masehi. Jalan darat ini adalah jalan yang paling tua. Selanjutnya Van Leur menerangkan bahwa jalan yang melalui laut dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat Malaka ke India dari sini ada yang ke Teluk Persia melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga di Laut Tengah. (JC. Van Leur 1967) dalam (Leirissa et al., 1996)

Sriwijaya merupakan salah satu emporium besar di Asia, karena produk dari wilayahnya mencapai pasar-pasar di bagian barat Asia, India, dan Cina. Keinginannya untuk menjadi sebuah imperium di bagian barat Indonesia berkurang hanya karena kehadiran kapal dagang Cina pada abad ke-12. Setelah berjaya selama kurang lebih 6 abad, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran, penjelasan dari aspek geografis/ekologis menunjukkan terjadinya sedimentasi sehingga pelabuhan berada jauh di pedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh kapal-kapal besar. Kota-kota Sriwijaya tidak dikelilingi komunitas pertanian; dan merosotnya jumlah penduduk; menyebabkan kedatangan pedagang asing semakin berkurang, terutama karena ketergantungan pada hanya produk hutan. Penjelasan dalam aspek politik dalam internal Kerajaan Sriwijaya sendiri terjadi konflik antar penguasa lokal pembentuk federasi Sriwijaya, khususnya Palembang dan Jambi menjaikan sriwijaya semakin melemah; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu terjadi 5 kali serangan terhadap ibukota Palembang oleh Raja Jawa dan Cola India. karena tidak lagi didukung oleh angkatan laut. Sriwijaya Tak mampu lagi mengendalikan armada angkatan laut yang bertumpu pada Suku atau Orang laut yang tercerai berai (Zuhdi, 2020).

Majapahit: Perpaduan Agraris Dan Maritim.

Kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Timur didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, pasca runtuhnya kerajaan Singasari wilayah Majapahit memungkinkannya menjadi kerajaan maritim dan bertumpu pada perdagangan internasional. Peluang itu diambil setelah perdagangan di wilayah Kerajaan Sriwijaya yang perlahan mulai memudar, oleh karenanya Majapahit mencoba mengambil alih lalu lintas perdagangan nusantara yang bermula dari Laut Jawa. Selanjutnya Majapahit bertransformasi menjadi kerajaan maritim baru tidak lama setelah Sriwijaya runtuh, kerajaan Majapahit berusaha mengendalikan jaringan perdagangan dan menguasai sebagian besar bandar-bandar dagang nusantara yang meliputi wilayah Sumatra hingga Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau di Maluku (Mahamid, 2023).

Sama halnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara adidaya untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti Cina dan India, kemudian negara-negara lain di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, selanjutnya Majapahit memusatkan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Bubat, yang terletak di sebelah utara tepi Sungai Brantas, selanjutnya hasil dagang dibawa ke Surabaya sebelum diantar menuju ibukota Majapahit yang terletak di pedalaman Jawa Timur.

Namun keistimewaan dari Kerajaan Majapahit terletak pada kemampuannya dalam mensinergikan tradisi perniagaan laut dan tradisi agraris dengan potensi kemaritiman, selain itu dapat mengatur sirkulasi barang dagangan, serta menindak tegas bagi setiap pemberontak yang membahayakan negara, baik yang terjadi di darat maupun di laut, langkah tersebut merupakan salah satu strategi pengamanan wilayah maritim Kerajaan Majapahit.

Majapahit bahkan melampaui wilayah kekuasaan Sriwijaya, meskipun masa hidupnya lebih singkat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebesaran Majapahit diakui di kepulauan (Nusantara). Jika Sriwijaya bercorak maritim, Majapahit merupakan negara agraris semi komersial dengan hasil pertanian dari pedalaman kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini Majapahit mengeksport komoditas tersebut melalui sejumlah pelabuhan di pantai utara Jawa. Dengan ciri seperti ini maka Majapahit juga mengendalikan aspek kemaritiman di Nusantara. Majapahit dapat disebut sebagai negara semi-maritim. Majapahit tidak mampu merespon perubahan ketika para pedagang Islam menguasai jalur-jalur perdagangan regional diiringi munculnya kekuatan baru di kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa. faktor ini merupakan ancaman eksternal yang turut mempercepat kejatuhan Majapahit (Zuhdi, 2020).

Penjelasan mengenai keruntuhan Majapahit lebih banyak diberikan dari aspek politik, tidak seperti Sriwijaya yang multi sebab. Konflik internal berupa perang saudara memuncak dan pecah dalam peristiwa perang Paregreg (peristiwa huru-hara) yang dianggap menjadi sebab utama dibanding dengan kemerosotan maritim sebagai aspek eksternal. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran, yang disebabkan adanya peningkatan armada perdagangan dari Cina untuk menggantikan dominasi Majapahit, selanjutnya perlahan mulai menguasai kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Hal tersebut terus berlangsung hingga awal abad ke-15, yaitu terjadinya berbagai konflik dan dinamika ekonomi maritim yang tidak mendapat perhatian serius dari istana Kerajaan Majapahit, ditambah pengaruh Islam yang kian berkembang luas, khususnya di Pulau Jawa. Faktor lainnya yang menyebabkan Kerajaan Majapahit semakin berada di ujung tanduk adalah berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan di antara keluarga internal kerajaan, belum lagi perebutan kekuasaan dan pertentangan antar keluarga kerajaan Majapahit yang saling berebut demi mendapat kekuasaan di kerajaan (Mahamid, 2023).

Demak (Abad XV-XVI): Kerajaan Islam dan Poros Maritim Nusantara

Kerajaan Demak memiliki letak geografis yang sangat mendukung, baik untuk bidang perdagangan maupun bidang agraris, sebab berlokasi di tepi selat sungai di antara Pegunungan Muria dan Jawa, yang akhirnya dijadikan pusat transaksi bagi para pedagang muslim dari Arab, Cina, dan India, di samping menjual barang dagangan, tidak sedikit dari mereka yang ikut mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar Kerajaan Demak, Kerajaan ini mengalami kemajuan pesat pada bidang maritim, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, dalam mewujudkan hal tersebut, Raden Patah dibantu putranya, Pati Unus (bernama lain Pangeran Sabrang Lor) yang waktu itu masih menjabat sebagai Adipati di Jepara, yang kemudian naik tahta menjadi Raja Demak, menggantikan ayahnya yang meninggal sekitar tahun 1518. Pati Unus berupaya keras dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di nusantara, salah satu upaya yang dilakukan Pati Unus yaitu menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Nusantara.

Dalam memperkuat kedudukan Demak sebagai kerajaan Islam maritim terbesar di nusantara, Pati Unus menjalin hubungan kerja sama dengan daerah-daerah di pantai utara Jawa yang sudah menganut agama Islam. Sebelum berdirinya Kerajaan Demak yang dikatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, beberapa pelabuhan di Pantai Utara Jawa para pedagang muslim telah mengembangkan kota-kota basis muslim, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, ketika masih dalam penguasaan Majapahit. Di lain sisi, kedatangan dan proses penyebaran Islam di pesisir utara Jawa, khususnya Demak bersamaan dengan situasi politik Majapahit yang di akhir masa

pemerintahannya yang mengalami kemunduran disebabkan konflik internal dan eksternal, para pedagang muslim dari berbagai negara seperti Arab, Gujarat, Persia, Mesir, Cina mulai berdatangan ke Demak dan mempercepat perkembangan Kerajaan Demak sendiri pada paruh awal abad ke 15 (Mahamid, 2023).

Sama halnya dengan kerajaan Majapahit Kerajaan Demak pun melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga ke timur Pulau Jawa, sekitar tahun 1527 sampai 1546, beberapa daerah yang berhasil dikuasai, antara lain Tuban, Wirasari (yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah), Gelang Gelang (sekarang Kabupaten Madiun), Surabaya, Gresik, Pasuruan, Lamongan, Blitar, Kediri, dan Blambangan (meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Situbondo). Dibawah kekuasaan Sultan Trenggono, kerajaan Demak mengalami kemajuan yang pesat dan mencapai puncak kejayaan diberbagai sektor seperti ekonomi, budaya, penyebaran silam, politik dan lain-lain.

Dalam bidang pelayaran, Kerajaan Demak mempunyai pelabuhan yang ramai dan kedudukannya sangat penting bagi perdagangan internasional, secara geografis wilayah demak melintang di laut nusantara dari Malaka ke Maluku yang membuat posisi Demak di Pantai Utara Jawa sangat strategis, selain itu Demak juga menjadi pusat perniagaan beras dari daerah Selat Muria, rempah-rempah dari Maluku, dan lada dari Lampung, yang ketiganya memiliki nilai jual tinggi di pasaran Internasional. Selain itu, keberadaan sungai di dekat pesisir utara Pulau Jawa, yakni Sungai Tuntang, Sungai Buyaran, dan Sungai Serang, turut mendukung kelancaran perdagangan Demak, jalur sungai ini juga membuat wilayah disekitarnya subur, serta memiliki pasokan air yang sangat melimpah bagi masyarakat Demak, dengan demikian hasil panen Demak pun sangat melimpah.

Konteks Saat Ini

Reinterpretasi terhadap paradigma maritim ini penting untuk dilakukan dalam konteks pandangan masa kini. Pertama, untuk membangun landasan konseptual dan legalitas yang jelas terhadap gagasan negara maritim yang dikembangkan. Kedua, untuk menerapkan konsep dan gagasan negara maritim dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dengan melakukan revitalisasi dan reinterpretasi paradigma maritim yang sesuai dengan jati diri bangsa maka diharapkan pembangunan nasional berdasarkan kerangka negara maritim mencapai hasil yang optimal. Dalam hal ini perlu fahami kembali sebagai negara maritim wilayah NKRI sudah terintegrasi antara lautan dan daratan. Sebagaimana kerajaan-kerajaan maritim besar di Nusantara, mereka memproduksi dan memperjual belikan berbagai komoditi dari berbagai pulau yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional dan pasar lokal.

Penting untuk diketahui bahwa Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan yang bebas dan maju, sejarah pun mencatat Indonesia memiliki posisi strategis geografis di sepanjang rute perdagangan maritim internasional (*silk road*) antara dua negara adidaya pada saat itu, yaitu India dan Cina. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan jika masyarakat Nusantara secara aktif mengambil bagian dalam perdagangan internasional dan tercatat pula bahwa nenek moyang masyarakat nusantara merupakan seorang pelaut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad ke-2 Masehi sudah ada kontak hubungan dagang antara Nusantara dan India. Selain itu, sejak abad ke-5 Masehi berbagai kerajaan di Nusantara telah mengirim utusan dagang ke Cina. Adapun produk yang diperdagangkan pada saat itu lada, cengkeh, pala, kayu cendana, beras, kain, dan sebagainya.

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam potensi ekonomi dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menciptakan suatu tahap pembangunan ekonomi yang disebut sebagai *complete economic integration*. Dalam kerangka itu, wilayah-wilayah Indonesia yang potensial perlu direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu area ekonomi yang mandiri dan relatif mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Sangat penting untuk dicatat bahwa untuk membangun negara maritim yang besar tidak hanya cukup dengan melakukan eksploitasi sumber daya kelautan saja. Pembangunan negara maritim mensyaratkan dilakukannya sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai

sejarah dan budaya maritim melalui berbagai media, seperti pendidikan, seni, sastra, dan sebagainya. Pembangunan sosial budaya maritim dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non-formal yang merupakan media untuk ilmu pengetahuan sosial dan internalisasi nilai-nilai sejarah dan budaya maritim (Sulistiyono, 2018).

Saat ini peran penting wawasan budaya maritim dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan Identitas Nasional di era Globalisasi. Dalam merawat identitas nasional di tengah era globalisasi sudah seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Agar jati diri bangsa dan negara Indonesia tidak memudar bahkan hilang oleh arus globalisasi yang sangat pesat ini. Upaya untuk memperkuat budaya maritim dapat dilakukan melalui Pendidikan, dalam hal ini adalah Pembelajaran sejarah kemaritiman baik di jalur formal (sekolah), informal (keluarga) dan non-formal (masyarakat). Pembelajaran sejarah maritim dapat memberikan kesepahaman identitas dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim serta peserta didik dapat memahami arti penting laut dalam perkembangan sejarah Indonesia. Selain itu, melalui pembelajaran sejarah maritim siswa dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam budaya maritim. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, keluarga maupun lingkungan sekitar. Pengenalan budaya maritim dapat diintegrasikan melalui Pendidikan karakter yang diajarkan sedini mungkin di sekolah-sekolah. Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Ketuhanan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma, agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat yang berlaku (Nurhayati & Amalia Shintasiwi, 2023).

Saat ini peningkatan pembangunan kemaritiman Indonesia berjalan seiring dengan kebijakan pencapaian MEF yang berujung pada terpenuhinya kekuatan minimum yang dibutuhkan negara. Kebijakan MEF Indonesia dimulai sejak tahun 2009 (Humas PT. PAL, 2019). Kebijakan tersebut dibagi ke dalam tiga tahap (periode 5 tahunan) sepanjang tahun 2009 hingga 2024. Pada tahap pertama 2009-2014, tahap kedua tahun 2014-2019, dan tahap ketiga pada tahun 2019-2024. Kebijakan MEF yang di dalamnya termasuk pemenuhan kebutuhan alutsista maritim ini mendapat dukungan konsisten dan cenderung meningkat dari anggaran pertahanan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara. Fokus pemerintah saat ini di bidang kemaritiman dinilai tepat dengan menyadari kenyataan Indonesia sebagai negara maritim dan memperhatikan situasi geopolitik yang berkembang. Adaptasi dan perubahan doktrin di masa yang akan datang sangat diperlukan mengingat perubahan arus globalisasi yang sangat pesat sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian oleh Pemerintah Indonesia dan harus memastikan komitmen pencapaian MEF pada tahun 2024 dan secara bertahap dalam meningkatkan kemampuan industri dalam negeri yang mendukung pencapaian kemandirian pertahanan (Hardianto, 2021).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia, poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menghubungkan konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan, dan perikanan Perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sejarah kejayaan Kerajaan Maritim di Indonesia Pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 Menurut Kenneth R Hall (1985) di Asia telah terbentuk lima zona perdagangan maritim (*maritime commercial zones*) yang mempengaruhi dinamika pelayaran dan perkembangan negara-negara di kawasan ini. Lima zona tersebut yaitu Teluk Bengal, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Jawa. Melalui Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia

(laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ketiga, *United Nation* (Unknown. Digidaya Maritim Nusantara).

Untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat diperlukan paradigma maritim yang kuat pula, yaitu wawasan atau pola pikir yang memandang wilayah daratan (kepulauan) sebagai bagian dari wilayah lautan, hal yang tidak kalah penting adalah untuk membangun negara maritim yang besar perlu sosialisasi dan enkulturasi nilai-nilai budaya sejarah dan budaya maritim melalui media pendidikan, seni, sastra, dan sebagainya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa selama masa penjajahan jiwa dan semangat bahari telah mengalami penurunan. (Sulistiyono, 2018). Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa lalu lintas damai di perairan pedalaman (laut teritorial Indonesia) bagi kapal asing dijamin, dan pendirian Indonesia dikemukakan dalam konferensi internasional mengenai hukum laut internasional. Pengakuan eksistensi kedaulatan Indonesia sebagai Negara Kepulauan tidak didapat dengan mudah, tetapi dicapai melalui perjuangan yang panjang dan gigih (*de facto & de jure*) (Sunaryo, 2019).

KESIMPULAN

Identitas nasional disini diartikan sebagai jati diri bangsa Indonesia dalam hal budaya maritim yang pada prakteknya dirasa penting untuk dikaji kembali sebagai upaya untuk menjadi benteng pertahanan identitas nasional di era tantangan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Budaya maritim sangat penting karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki sejarah panjang dalam hal kelautan semenjak zaman kerajaan, diantaranya kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Demak. Saat ini diperlukan adanya kesadaran di masyarakat untuk mengakui eksistensi budaya maritim atau budaya bahari dalam berbagai sektor. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Budaya maritim perlu dikaji kembali oleh beberapa lembaga formal maupun informal dan pemerintah perlu mengetahui peran Indonesia sebagai negara maritim dan memperhatikan situasi geopolitik yang berkembang. Tantangan globalisasi tidak dapat dihindari sehingga budaya maritim sebagai identitas nasional dapat menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi globalisasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi yang ingin saya sampaikan yaitu penting dicatat oleh semua pihak bahwa kemajuan Indonesia, terutama dalam bidang kemaritiman patut ditingkatkan kembali, peran guru di seluruh sekolah di Indonesia sangat penting, sehingga dengan penelitian ini diharapkan semua pihak bukan hanya guru dapat memberikan sumbangsih yang nyata kepada proses pendidikan yang terbaik di Indonesia

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Dosen Universitas Negeri Semarang ibu Dr. Ufi Saraswati, M.Hum dalam hal ini sebagai pengampu mata kuliah Wawasan Global yang sudah memberikan perkuliahan dan materi yang sangat komprehensif sehingga peneliti dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik, peneliti menyadari masih banyak kekuarangan dalam penelitian, semoga kedepan akan ada penelitian serupa yang menyempurnakan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8549–8557. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2355>
- Hardianto, M. K. B. (2021). Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia sebagai Negara Maritim. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i1.1291>
- Hilmi, M. Z. (2022). Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Perilaku Sosial Anak-Anak Remaja di Desa Sepit

- Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Journal of Education Social Studies*, 4(1), 1–7. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Leirissa, R. ., Ohorella, G. ., & Tangkilisan, Y. B. (1996). .*Bidang, Yang*.
- Mahamid, M. N. L. (2023). Sejarah Maritim di Nusantara (Abad VII-XVI): Interkoneksi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 32–49. <https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.23014>
- Nurhayati, S., & Amalia Shintasiwi, F. (2023). *STRATEGI PEMBELAJARAN IPS BERMUATAN MULTIKULTURAL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN NILAI TOLERANSI DI SMP NEGERI 2 WANGON* *Info Artikel*. 5(1), 50229. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Salim, & Nugroho, A. (2021). Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9(1), 119–130. <https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/71>
- Sulistiyono, S. T. (2018). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 81. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461>
- Sunaryo, T. (2019). Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan. *Jurnal Kajian Strategik*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i2.10022>
- Wa Ode Reni1, E. A. M. (2024). Sejarah Maritim Indonesia : Meretas Sejarah ., *Journal of International Multidisciplinary Research Informasi*, 2, 120–127. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/551%0Ahttps://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/551/487>
- Wiranto, S. (2020). Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia : Perspektif Pertahanan Maritim. *Jurnal Mairitim Indonesia*, 8(2), 110–126.
- Zuhdi, S. (2020). Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian ...)*, 8(2), 3–8.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Unknown. *Digdaya Maritim Nusantara*.